

RINGKASAN

Era Fadilah
220510064

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Pertambangan Ilegal
(Studi Putusan No 464/PID.SUS/2024/PT PTK)
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H, Dr. Hamdani, S.H., LL.
M)**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib dilakukan berdasarkan perizinan yang sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan hukum, salah satunya dalam Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2024/PT PTK yang membebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan penambangan tanpa izin. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Minerba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pertambangan ilegal dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan bebas karena menilai unsur tindak pidana penambangan tanpa izin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan analisis yuridis, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pertimbangan hakim belum mengkaji secara menyeluruh ketentuan mengenai sistem perizinan pertambangan khususnya keterkaitan antara Izin Usaha Pertambangan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Putusan bebas dalam perkara ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap penerapan ketentuan tindak pidana pertambangan tanpa izin sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penerapan ketentuan hukum pertambangan secara utuh.

Disarankan hakim sebaiknya menerapkan ketentuan Undang-Undang Minerba secara lebih sistematis dan komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang pertambangan.

Kata Kunci: Putusan hakim, Tindak Pidana, Pertambangan, Ilegal.

SUMMARY

**Era Fadilah
220510064**

***Legal Analysis of Judges' Decisions Regarding Illegal Mining Crimes (Study of Decision No. 464/PID.SUS/2024/PT PTK)
(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H, Dr. Hamdani, S.H., LL. M)***

Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining stipulates that all mining activities must be conducted based on valid permits. However, in practice, there remain discrepancies in legal application—exemplified by Judgment Number 464/Pid.Sus/2024/PT PTK, which acquitted the defendant of charges regarding unauthorized mining. This raises issues concerning the judge's reasoning and the judgment's alignment with the provisions of the Mineral and Coal Mining Law.

This study employs normative legal research utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were gathered through literature review and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method to examine applicable legal provisions and the judge's reasoning in the subject judgment.

The study reveals that the judge issued an acquittal because the elements of the criminal offense of unauthorized mining were not proven legally and convincingly. Based on a juridical analysis, the author argues that the judgment does not fully align with Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining; the judge's reasoning failed to comprehensively examine provisions regarding the mining licensing system—specifically the interrelationship between the Mining Business License (IUP), the Work Plan and Budget (RKAB), and the fulfillment of criminal offense elements as stipulated in Article 158 of the Mineral and Coal Mining Law. The acquittal in this case continues to give rise to differing interpretations regarding the application of provisions on unauthorized mining offenses, thereby failing to fully reflect a holistic application of mining laws.

It is recommended that judges apply the provisions of the Mineral and Coal Mining Law in a more systematic and comprehensive manner so that the resulting judgments provide legal certainty and justice, while supporting the effectiveness of law enforcement in the mining sector.

Keywords: Judicial judgment, Criminal offense, Mining, Illegal.